

**TESIS**  
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM**  
**JAKPRENEUR DALAM MEMBERDAYAKAN PELAKU**  
**UMKM DI KECAMATAN KEMBANGAN KOTA**  
**ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

Disusun oleh:

**NAMA : ANNA ELISABETH PANJAITAN**  
**NPM : 2041021019**  
**PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA**  
**KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK**

Tesis Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P.)



**POLITEKNIK**  
**STIA LAN**  
J A K A R T A

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**  
**POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**  
**PROGRAM MAGISTER TERAPAN**  
**TAHUN 2023**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

**LEMBAR PERSETUJUAN TESIS**

NAMA : ANNA ELISABETH PANJAITAN  
NPM : 2041021019  
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA  
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

JUDUL TESIS (BAHASA INDONESIA) :

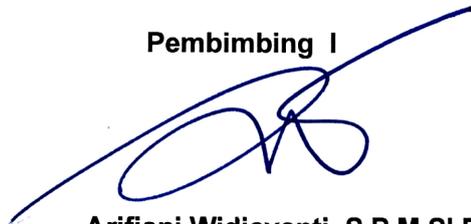
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM JAKPRENEUR DALAM  
MEMBERDAYAKAN PELAKU UMKM DI KECAMATAN KEMBANGAN KOTA  
ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

JUDUL TESIS (BAHASA INGGRIS) :

THE IMPLEMENTATION OF JAKARTA ENTREPRENEURSHIP (JAKPRENEUR)  
PROGRAM IN EMPOWERING SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN  
KEMBANGAN DISTRICT ADMINISTRATIVE CITY OF WEST JAKARTA

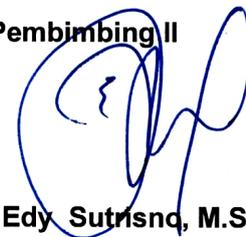
Diterima Dan Disetujui oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan

**Pembimbing I**



**Arifiani Widjayanti, S.P,M.SI,PH.D**

**Pembimbing II**



**Dr. Edy Sutrisno, M.Si**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN**

**POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

NAMA : ANNA ELISABETH PANJAITAN  
NPM : 2041021019  
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA  
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK  
JUDUL TESIS : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM JAKPRENEUR  
DALAM MEMBERDAYAKAN PELAKU UMKM DI  
KECAMATAN KEMBANGAN KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA BARAT

Telah Mempertahankan Tesis Dihadapan Tim Penguji Tesis Program Magister  
Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta,  
Lembaga Administrasi Negara, Pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 31 Juli 2023  
Pukul : 13.00 – 14.30

**TELAH DINYATAKAN LULUS**

**PENGUJI TESIS :**

**Ketua Sidang : Dr. Mala Sondang Silitonga, MA**

**Sekretaris : Dr. Hamka, MA**

**Pembimbing 1 : Arifiani Widjayanti, S.P,M.SI,PH.D**

**Pembimbing 2 : Dr. Edy Sutrisno, M.Si**

**Anggota : Dr. Ridwan Rajab, M.Si**



## SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ANNA ELISABETH PANJAITAN  
NPM : 2041021019  
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA  
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan tugas akhir yang telah saya buat ini dengan judul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM JAKPRENEUR DALAM MEMBERDAYAKAN PELAKU UMKM DI KECAMATAN KEMBANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT", **merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya.**

Apabila di kemudian hari penulisan tugas akhir merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA-LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar sehat dan tidak dalam paksaan.

Jakarta, 18 Juli 2023

Yang memberikan Pernyataan

  
(Anna Elisabeth Panjaitan)

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenanan-Nya, Saya sudah menyelesaikan Tugas Akhir Penelitian berjudul: **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM JAKPRENEUR DALAM MEMBERDAYAKAN PELAKU UMKM DI KECAMATAN KEMBANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT”**. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih setulus hati serta apresiasi tinggi kepada Ibu Arifiani Widjayanti, S.P,M.SI,PH.D, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Edi Sutrisno, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dan kesabaran memberikan sumbangsih dalam bentuk pikiran, bimbingan dan arahan kepada penulis.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan penuh dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Direktur dan para Wakil Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Para dosen Politeknik STIA LAN Jakarta;
3. Ibu Dr. Mala Sondang Silitonga, MA selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan saran dan masukan;
4. Bapak Dr. Hamka, MA selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan saran dan masukan;
5. Segenap dosen STIA LAN Jakarta yang telah memberikan ilmunya dan bimbingannya selama dua tahun menjalankan studi pada Program Magister Administrasi di Politeknik STIA LAN Jakarta;
6. Bapak Iqbal Idham Ramid SIP, M.Si selaku Kepala Suku Dinas (Kasudin) Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) Kota Administrasi Jakarta Barat, Ibu Nesvi Panjaitan, SE, MM selaku Kepala Sub Bagian Umum (Kasubag) PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Barat, dan Bapak Ika Adhis, SE, MM selaku Kepala Seksi (Kasie) PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah bersedia diwawancari dalam proses pengumpulan data;

7. Bapak Reihan Abhipradana selaku Kebijakan Publik & hubungan Pemerintah Daerah dari Tokopedia Tower Ciputra World , Bapak Kepala BPPJ Provinsi DKI Jakarta, Bapak Priyandani Putra, Jakarta Creative Hub, Provinsi DKI Jakarta, Ibu Zahra Uyun, Manager bisnis UKM Bank DKI Pusat, yang telah bersedia membantu penulis dalam proses pengumpulan data;
8. Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam proses penyusunan tesis ini;
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Akhir kata, Penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah bersedia membantu. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penerapan dan pengembangan ilmu dalam kehidupan nyata.

Jakarta, 18 Juli 2023

Penulis

POLITEKNIK  
STIA LAN  
JAKARTA

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM JAKPRENEUR DALAM PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KECAMATAN KEMBANGAN PADA SUKU DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**Anna Elisabeth Panjaitan**

*mails4annaelis2041021019@gmail.com*

**Politeknik STIA LAN Jakarta**

Arah Kebijakan Pengembangan UMKM yang tepat sangat dibutuhkan bagi UMKM saat ini. Dibutuhkan Reformasi tata kelola pengembangan yang berorientasi pada layanan prima dan kebijakan lintas bidang. Untuk itu, *Jakpreneur* hadir membantu memberikan solusi bagi para UMKM tersebut dengan program pengembangan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha. Penelitian ini mencermati dan mengulas implementasi kebijakan program Jakpreneur dalam memberdayakan pelaku UMKM di Kecamatan Kembangan pada Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) Jakarta Barat. Penulis menggunakan teori George Edward III, karena dapat diterapkan dan relevan untuk menjadi konsep analisis faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program Jakpreneur dan melalui teori ini juga, hambatan-hambatan yang ditemukan dapat diselesaikan. Metode Penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan, aspek perencanaan sudah rasional namun dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala, seperti miskomunikasi antar sudin pengampu Jakpreneur dengan kolaborator serta pelaku usaha, kapasitas dan kompetensi SDM yang masih rendah, sarana prasarana penunjang yang masih terbatas, kurangnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya program Jakpreneur, distribusi tugas dalam struktur birokrasi masih tumpang tindih dan tidak sesuai dengan orang yang tepat di posisi yang tepat (*right man on the right place*). Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan adalah penyusunan SOP terintegrasi bersama seluruh Suku Dinas pengampu Jakpreneur, identifikasi profiling pelaku usaha sesuai kapasitasnya, dilakukan Monev rutin berkala dan menyeleksi mitra-mitra kolaborator lebih potensial.

Kata Kunci: Implementasi, kebijakan, *Jakpreneur*, Pemberdayaan UMKM.

## **ABSTRACT**

### **THE IMPLEMENTATION OF JAKARTA ENTREPRENEURSHIP (JAKPRENEUR) PROGRAM IN EMPOWERING SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN KEMBANGAN DISTRICT ADMINISTRATIVE CITY OF WEST JAKARTA**

**Anna Elisabeth Panjaitan**

**[mails4annaelis2041021019@gmail.com](mailto:mails4annaelis2041021019@gmail.com)**

**Politeknik STIA LAN Jakarta**

*Development Policy is very much needed for SMEs at this time. Reformation is needed in SMEs development governance for service-oriented and cross-sectoral policies. For this reason, Jakpreneur is here to help provide solutions for these SMEs with development programs for skills and business independence. Jakpreneur presents to provide solution for these MSMEs with potential skills development program and business independence. The author uses the theory of George Edward III, because it can be applied and relevant to the concept of analyzing the factors that hinder the implementation of the Jakpreneur program and through this theory as well, the obstacles found can be resolved. This research applies case studies with descriptive qualitative methods, which examines and reviews the empowerment program for SMEs actors of Jakpreneur program in Kembangan District, West Jakarta PPKUKM Sub Department in order to enable it to adapt to this completely uncertain situation, and be able to remain stable and even more advanced in business, which finally can bolster the economic recovery. The results of the study indicate that the planning aspect is rational, but in its implementation there are still various obstacles, such as miscommunication between the Jakpreneur sub-agency and collaborators and business actors, the capacity and competency of human resources is still low, supporting infrastructure is still limited, the lack of awareness of business actors about the importance of the program Jakpreneur, the distribution of tasks in the bureaucratic structure still overlaps and does not suit the right person in the right position. The steps that need to be taken to overcome the problem are the preparation of an integrated SOP with all Jakpreneur sub-depts, identification of profiling of business actors according to their capacity, conducting periodic routine monitoring and evaluation and selecting more potential collaborator partners.*

*Key Words: Implementation, policy, Jakpreneur, SME Empowerment.*

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN TESIS</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN</b> .....	1
A. Latar belakang Permasalahan.....	1
B. Identifikasi Permasalahan .....	10
C. Perumusan Permasalahan .....	11
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Tinjauan Kebijakan.....	27
C. Tinjauan Teori .....	28
D. Konsep Pemberdayaan dan Konsep Usaha Kecil/Menengah.....	52
E. Pemberdayaan.....	53
F. Definisi UMKM .....	55
G. Konsep Kunci .....	56
H. Model Berpikir .....	58
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	61
A. Metode Penelitian .....	61
B. Teknik Pengumpulan Data .....	65
C. Prosedur Pengolahan Data .....	66
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b> .....	69
A. Deskripsi Daerah Penelitian .....	69
B. Analisis dan Pembahasan .....	75

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>111</b>
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran .....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>116</b>



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
JAKARTA  
JAKARTA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Monitoring dan Evaluasi P1-P7 Pada Tahap Pendaftaran di Sistem Jakpreneur Per tanggal 31 Agustus 2021 .....	9
Tabel 2. 1 Matrix Hasil Penelitian Terdahulu .....	13
Tabel 3.1 Jumlah Informan .....	62



**POLITEKNIK  
STIA LAN**  
J A K A R T A  
J A K A R T A

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Klasifikasi Usaha Kecil, Mikro dan Menengah serta Besar.....	5
Gambar 2.1 Dampak Implementasi .....	36
Gambar 2.2 Pendekatan Proses Analisa Kebijakan dengan Tipikal Produk Kebijakan .....	41
Gambar 2.3 Tahap <i>Public Policy</i> .....	42
Gambar 2.4 Jumlah Penduduk DKI Jakarta.....	49
Gambar 2.5 TPT DKI Jakarta Tahun 2017 .....	50
Gambar 2.6 Model Berpikir.....	60

POLITEKNIK  
STIA LAN  
JAKARTA  
JAKARTA

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I TRANSKRIP WAWANCARA .....	120
LAMPIRAN II DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA .....	167



**POLITEKNIK  
STIA LAN**  
J A K A R T A  
J A K A R T A

## **BAB I**

### **PERMASALAHAN PENELITIAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha kecil. Adapun terdapat klasifikasi UMKM yaitu berdasarkan jumlah karyawan, kekayaan bersih atau aset, dan berdasarkan perkembangan usaha.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peran serta, membangun potensi yang besar dalam kebangkitan perekonomian nasional maupun sektoral utama dalam memperkenalkan kearifan budaya lokal sebuah negara termasuk Indonesia dalam penciptakan peluang usaha serta perluasan membuka lapangan kerja. Kendala/kesulitan yang mereka butuhkan terutama dalam hal permodalan, produksi, pemasaran dan manajemen bisnis. Dengan peran serta pemda DKI membuat suatu wadah yang di sebut jakpreneur, sebagai pemangku kebijakan agar mereka mendapat prioritas, serta perhatian dari berbagai pemangku kepentingan, baik dari Pemerintah/Pemda melalui BUMN/BUMD, dari pihak swasta maupun dari perguruan tinggi berdasar fungsi yang masing-masing emban. Dilihat dari ruang lingkupnya, kondisi usaha kecil masih relatif lemah, masih terbatas pada usaha pemenuhan kebutuhan konsumsi lokal ataupun lingkungan dimana usaha tersebut berada. Kondisi usaha kecil dan koperasi yang demikian disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki terutama pada:

- Kemampuan pengelolaan usaha
- Keterbatasan modal kerja
- Kelangkaan sarana – sarana yang dimiliki
- Akses Pemasaran

Jenis UMKM pertama adalah usaha mikro. Usaha ini merupakan badan usaha produktif perorangan yang memiliki aset atau kekayaan

bersih kira-kira 50 juta setiap bulannya dan sudah memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Namun selain itu bentuk usaha mikro ini memiliki ciri-ciri tertentu. Seperti belum pernah melakukan administrasi keuangan secara sistematis, sulit untuk mendapatkan bantuan dari perbankan, dan barang yang dijual selalu berubah-ubah serta bentuk dari usahanya masih relatif kecil.

Usaha menengah adalah ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

*Jakpreneur* merupakan sebuah program yang dilaksanakan oleh Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta dalam bidang ekonomi, khususnya ekonomi kreatif guna memberdayakan masyarakat dalam menghadapi tantangan persaingan ekonomi global termasuk di saat pandemi penyakit virus corona 2019 (covid -19). Melalui *Jakpreneur*, berbagai program fasilitasi yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat diakses oleh peserta *Jakpreneur* untuk membantu memudahkan mengembangkan usahanya. Sehingga setiap orang dapat memiliki keterampilan dan kemandirian berusaha serta diberi kesempatan untuk meraih kesuksesannya. *Jakpreneur* berlaku untuk semua Wilayah DKI Jakarta, termasuk Kota Administratif Jakarta Barat di mana menjadi bagian dari objek penelitian. Meskipun demikian, Perencanaan program yang sesuai prosedur peraturan perundang-undangan belum tentu dalam tahapan pelaksanaan (implementasi) dapat berjalan dengan baik dan lancar. Karena tahap tersebut membutuhkan banyak faktor dan indikator untuk mencapai kesuksesan sebuah program. (Dr. Taufiqurokhman, S.Sos,M.Si,2008).

Data menunjukkan, bahwa dalam Implementasi Kebijakan Program Pemprov. DKI di Kecamatan Kembangan masih mengalami kendala di tataran lapangan, di mana masyarakat Pegiat Usaha Kecil, Mikro dan

Menengah (UMKM) belum semuanya memahami akan maksud dan tujuan Program Gubernur dan Wakil Gubernur, belum menguasai teknologi digital yang sedang berkembang dan aktual, dan begitupun petugas dari pemerintah belum mampu mengsosialisasikan dengan baik. Beberapa permasalahan tersebut menjadi skala prioritas dalam pembangunan kawasan strategis industri baik di DKI Jakarta itu sendiri sebagai kota metropolitan atau pintu masuk dan keluar bisnis internasional maupun dalam skala regional Jakarta Barat yang memiliki potensi berkembangnya kewirausahaan. Dengan demikian sangat membutuhkan intervensi program dan pendampingan dari dinas teknis terkait, dinas Usaha kecil menengah Jakarta Barat.

Dasar Hukum Program *Jak-preuner* adalah Peraturan Gubernur (Pergub.) DKI Jakarta, Nomor : 102 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT), kemudian ditindaklanjuti dengan Pergub. DKI Jakarta, Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT). Pergub. tersebut searah dengan “payung” hukum Undang-Undang (UU) Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya pada pasal dan ayat tentang fasilitas, proteksi dan *empowering* (memberdayakan) UMKM. Implikasi terhadap UU Cipta Kerja agar memberikan kemudahan izin terhadap UMKM yang berupa pendampingan pengurusan izin dan pelayanan berbantuan. Melalui implementasi peraturan perundang-undangan tersebut, maka penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya para pelaku ekonomi. Berbagai cara dilakukan seperti pemberdayaan masyarakat dalam angka mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Pembangunan Sektor Ekonomi dapat dilaksanakan melalui memberdayakan UMKM, karena UMKM mampu menggerakkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam menciptakan tenaga kerja dan sumber pendapatan. Selain itu, ia sanggup pemeratakan pendapatan masyarakat. Karena UMKM sanggup melibatkan banyak kalangan untuk berbisnis.

UMKM juga berperan strategis dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Keberadaannya mampu mengurangi penganggur dan membuka lapangan atau mampu menyerap tenaga kerja, sekaligus membuka kesempatan kerja dan pendapatan. Dengan membuka lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran berarti pemerintah sedang melaksanakan pembangunan suatu wilayah. (Penanggulangan, 2009).

Dalam kaitannya dengan pembangunan nasional, UMKM memiliki peran strategis sebagai distribusi hasil-hasil pembangunan. Pada gejolak ekonomi di Indonesia 1998 lalu, di mana terbanyak usaha skala besar yang mengalami kemandekan dan *collaps*, Sektor UMKM terbukti bertahan dalam menghadapi krisis dimaksud. Berdasarkan pengalaman berharga tersebut, maka tidak berlebihan apabila kebijakan pengembangan ekonomi riil yang berpihak kepada Swasta (*Private Sector*) diarahkan pada Memberdayakan Pelaku UMKM, terutama bagi unit usaha yang terabaikan dikarenakan oleh hasil produksinya berskala minimum dan belum mampu berkompetisi.

UMKM merupakan jenis bisnis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan bersentimen positif terhadap ekonomi secara luas. UMKM juga merupakan usaha informal yang muncul, karena melihat peluang di sekitar. Usaha produktif ini bisa berkelanjutan (kontinuitas) bila mendapat dukungan dari Pihak Pemerintah (*Public Sector*).

Pemprov. DKI Jakarta berkomitmen untuk memberdayakan UMKM di seluruh Kota Administratif melalui Kebijakan *JakPreneur* kepada masyarakat Kota Metropolitan. Program Kewirausahaan Terpadu (PKT) telah diimplementasikan sejak 2019 lalu dan terus disesuaikan dengan perkembangan industri dan *market needs* serta menerima masukan yang berasal dari para pelaku usaha. Keberhasilan suatu wilayah diukur dari Pembangunan Ekonomi, tidak terlepas dari meningkatnya jumlah pelaku usaha besar bermula dari tingkatan UMKM. Pemprov DKI Jakarta sebagai kota industri nasional akan terus menjadi sorotan dalam rangka mensiasati perkembangan wirausaha baru yang bisa naik ke level lebih tinggi melalui Program *Jak-preneur*.

Jakpreneur yang adalah singkatan dari *Jakarta Entrepreneurship* (Wirausaha Jakarta) termasuk dalam Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Program OK OCE pada 2018 dan PKT pada 2019. Metamorfosis nama ini dalam rangka kampanye program dan mengembangkan usaha.

Program *Jakpreneur* dilaksanakan oleh lima Dinas Provinsi (Sudin Pengampu) dan Suku Dinas (Sudin) Tingkat Kota Administrasi. Pemda DKI Jakarta telah memiliki sistem basis data untuk program *Jakpreneur* yang berisikan data UMKM binaan, dimana pada sistem tersebut sampai saat ini sudah terdaftar sebanyak 344.243 pelaku usaha (<https://jakpreneur.jakarta.go.id/index>). Dengan banyaknya pelaku usaha demikian, diharapkan menjadi wadah kreatif, inovatif dan kolabratif antar *stake holders* (pemangku usaha) seperti: pemerintah, dunia akademik, masyarakat pelaku usaha dan pihak lainnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, maka menurut peraturan tersebut, bahwa Klasifikasi UMKM dan Usaha Besar sebagaimana tabel berikut :

**Gambar 1. 1 Klasifikasi Usaha Kecil, Mikro dan Menengah serta Besar**

Ukuran Usaha	Aset	Omset
Mikro	Maks Rp 50 Juta	Maks 300 Juta
Kecil	50 – 500 Juta	300 Juta – 2,5 Milliar
Menengah	500 Juta – 10 Milliar	2,5 – 50 Milliar
Besar	Min. 10 Milliar	Min. 50 Milliar

Gambar 1.1. di atas mengklasifikasikan UMKM menurut ukuran usaha, aset dan omset, di mana pada Usaha Mikro kategori aset paling

tinggi Rp.50,000,000,- dan Omset maksimal Rp.300,000,000,- Usaha Kecil dengan aset lebih besar dari Rp.50,000,000,- dan paling tinggi Rp. 500,000,000, dan Omset sebesar Rp.300,000,000,- sampai Rp.250,000,000,000,-; Usaha Menengah lebih dari Rp 500,000,000,- sampai Rp.10,000,000,000,- dan Omset antara Rp.25,000,000,000,- sampai Rp.50,000,000,000,-, dan Ukuran Usaha Besar memiliki aset sebesar Rp.10,000,000,000,- ke atas dan omset lebih dari Rp.50,000,000,000,-.

Persentase UMKM seluruh Pemprov. DKI Jakarta terbilang 98,78 dari total usaha. Pemprov. DKI berkomitmen berperan aktif Memberdayakan UMKM melalui Program *Jak-preneur*. (BPS DKI Jakarta). Pelaku *Jak-preneur* berkesempatan memperoleh fasilitas agar berkembang secara kolaboratif. Di antaranya dengan mengakses fasilitator secara berkala, melatih perkembangan serta kreatifitas UMKM, bantuan modal ke pihak Bank, akses pasar, dan legalitas ruang kota.

Langkah awal Publikasi dan Sosialisasi PKT di Jakarta pada 2017 dengan Deklarasi 200.000 Wirausahaan Pemula dan Wirausahawan Naik Tingkat dalam Program *One Kecamatan One Center for Entrepreneurship* (OK OCE), yang kemudian dikenal dengan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu atau PKT, di mana dalam kurun waktu setahun (2018) telah terbina melebihi 39.000 UMKM. Kegiatan usaha ini lebih banyak melibatkan wirausahawati (kaum perempuan) dan wirausahawan pemula. Program *OK OCE* berorientasi pada menciptakan wirausahawan dan membuka lapangan kerja baru (*start-up*) yang masuk dalam kategori UMKM.

Wujud keberpihakan Pemprov. DKI Jakarta terhadap Program Unggulan ini adalah melalui kebijakan anggaran yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 82 milyar untuk Program OK OC yang diperuntukan bagi pendampingan anggota dan pendirian tempat kumpul kreatif (*co-working space*) pada setiap kecamatan, ([news.detik.com](http://news.detik.com)). Di Pemerintah Kecamatan didirikan sebanyak 44 Pos Pengembangan Kewirausahaan (PPK) yang berkantor pada tiap kecamatan. PPK memfasilitasi proses

berusaha melalui Pendaftaran, Pelatihan, Pendampingan, Perizinan, Pemasaran, Pelaporan Keuangan dan Permodalan. Pada 2019 terdapat sebanyak 111.108 UMKM yang bergabung, di mana berhasil menerbitkan 13.321 wirausahawan baru. Selanjutnya, diberikan kesempatan dalam kegiatan pemasaran yang melibatkan 7.327 wirausahawan dan 1.064 wirausaha dimodali oleh Bank DKI Jakarta. Kini (2022), *Jak-preneur* tampil sebagai Implementor Peraturan Gubernur tentang PKT, di mana terdapat keleluasaan besar bagi calon wirausahawan dan wirausahawan mengembangkan usahanya.

Tata cara pendaftaran sangat sederhana, yaitu via situs <https://jakpreneur.jakarta.go.id> dan mengantar dokumen ke kantor Kecamatan sebagai sekretariat ataupun ke Sentral Pelatihan Pemprov DKI Jakarta dan akan dibantu oleh Pendamping (fasilitator) kewirausahaan di setiap wilayah kecamatan.

Kegiatan *Jak-preneur* dilaksanakan oleh tujuh dinas pengampu, masing-masing: 1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PPKUKM); 2) Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian; 3) Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi; 4) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 5) Kebudayaan; 6) Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, serta 7) Dinas Sosial. *Jakpreneur* juga bersifat terbuka untuk berkolaborasi dan berinovasi dengan berbagai pihak (*stake-holders*) seperti: Pihak Akademisi, Perbankan, dan Praktisi Bisnis (*e-commers*). Saat ini *Jakpreneur* sudah menjadi *platform* kolaborasi bersama berbagai jenis usaha, diawali Pelatihan Bersama Perguruan Tinggi dan Praktisi, Pasar Bersama *e-commerce* hingga berakses modal bersama Para Aplikator dan Pihak Perbankan. Beberapa kegiatan kolaboratif yang sedang berlangsung, bersama perusahaan di antaranya adalah: *Shopee*, *Gojek*, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III – Jakarta dan Koordinasi dengan Perguruan Tinggi di Pemprov. DKI Jakarta, Facebook, Netzme. Langkah Kebijakan Program Kewirausahaan *Jak-preneur* ini merupakan Program Pembinaan dan

Pendampingan kepada Pelaku UMKM, terkhusus binaan UMKM di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat ini sudah dirintis sejak awal 2018 dan masih bertahan sampai saat ini. Selanjutnya Provinsi DKI Jakarta, mengembangkan kebijakan program *Jak-preneur*, yaitu dengan menerapkan tujuh metode keberhasilan mencakup: Registrasi (P1); Pendidikan Pelatihan (P2); Pendampingan (P3); Perizinan (P4); Pemasaran (P5), Pelaporan Keuangan (P6), dan Permodalan (P7).

Pengakuan terhadap keberhasilan seorang wirausahawan, apabila telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) atau telah mencapai Tahap P4 (Perizinan). Pada level tersebut jumlah Pengusaha baru yang terjaring, persentasinya masih kurang dengan angka mencapai 52%. Bersumber dari Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM Kota Administrasi Jakarta Barat yang dilihat pada data pendaftaran peserta Program *Jakpreneur*, sebagai berikut

JAK  
PRENEUR

**Tabel 1. 1**  
**Monitoring dan Evaluasi P1-P7 Pada Tahap Pendaftaran di Sistem**  
**Jakpreneur Per tanggal 31 Agustus 2021**

	Kota	Binaan	Jumlah Petugas Pendamping	Pendaftaran			
				Target	Realisasi Sistem	Selisih Target	Persentasi
	Kembangan	UKM dan UKM	8	1 603	831	-1 318	52%
	Kebon Jeruk	UKM dan UKM	8	1 603	828	-1 181	51%
	Palmerah	UKM dan UKM	8	1 603	862	-1 154	54%
	Grogol Petamburan	UKM dan UKM	8	1 603	947	-1 068	59%
	Cengkareng	UKM dan UKM	8	1 603	1082	-1 173	67%
	Kalideres	UKM dan UKM	8	1 603	863	-1 198	54%
	Tambora	UKM dan UKM	8	1 603	933	-1 074	58%
	Tamansari	UKM dan UKM	8	1 602	1004	-1 204	63%
<b>Total Keseluruhan</b>			<b>64</b>	<b>12 823</b>	<b>7.350</b>	<b>-7 092</b>	<b>57%</b>

(Sumber : Sudin PPKUMK, 2021)

Tabel 1.2 di atas, menunjukkan, tahap pendaftaran pada Sistem *Jakpreneur* baru mencapai angka 52% dari target yang diharapkan. Hal ini menggambarkan, bahwa masih banyak yang belum memahami adanya program *Jakpreneur*. Dengan kata lain, selisih target cukup banyak tersebut perlu disiasati dengan strategi mengejar target dengan berbagai upaya dan cara.

## B. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, penulis menjumpai adanya indikasi permasalahan-permasalahan terkait dengan Implementasi Kebijakan Program *Jakpreneur* terhadap Memberdayakan Pelaku UMKM pada Sub Dinas (Sudin) Perindustrian Perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah (PPKUKM) Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai berikut :

- 1) Belum tercapainya target Perekrutan peserta *Jakpreneur* dari perencanaan 100% hanya mencapai 52%. Sedangkan kecamatan kembangan merupakan *Pilot Project* pengembangan dan peningkatan kualitas UMKM bagi kecamatan lain di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.
- 2) SOP (Standart Operasional Prosedur) ada namun masih terpusat di Sudin PPKUKM, belum terintegrasi ke seluruh SKPD sehingga menimbulkan komunikasi yang tidak selaras dan tumpang tindih.
- 3) Miskomunikasi antar sudin pengampu *Jakpreneur* dengan kolaborator serta pelaku usaha.
- 4) Kesiapan kompetensi dan kapasitas SDM masih rendah.
- 5) Kesiapan aplikasi sistem *Jakpreneur* belum maksimal.
- 6) Kurangnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya program *Jakpreneur*.
- 7) Distribusi tugas dalam struktur birokrasi masih tumpang tindih dan tidak sesuai dengan orang yang tepat di posisi yang tepat (*right man on the right place*).

Merujuk pada uraian tersebut, maka peneliti mengangkat judul: **"Implementasi Kebijakan Program *Jakpreneur* dalam Memberdayakan Pelaku UMKM di Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat."**

### C. Rumusan Masalah

Sejauh pengamatan peneliti terdapat sebuah fenomena yang telah teridentifikasi diatas, dimana perencanaan program *Jakpreneur* nampaknya rasional namun dalam implementasinya terutama dalam memberdayakan para pelaku umkm terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Mengapa Implementasi Kebijakan Program *Jakpreneur* dalam memberdayakan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah pada Sudin PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Barat belum efektif?
- 2) Faktor – faktor apa yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program *Jakpreneur* di Kecamatan Kembangan?
- 3) Bagaimana strategi implementasi kebijakan program *Jakpreneur* berdasarkan Struktur Birokrasi, Komunikasi, Sumber Daya, dan Disposisi pada Sudin PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Barat?

### D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam tulisan ilmiah ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis mengapa Implementasi Kebijakan Program *Jakpreneur* dalam memberdayakan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah pada Sudin PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Barat belum efektif.
- 2) Untuk mengidentifikasi faktor–faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program *Jakpreneur* di Kecamatan Kembangan.
- 3) Untuk merumuskan Strategi Implementasi Kebijakan Program *Jakpreneur* berdasarkan Struktur Birokrasi, Komunikasi, Sumber Daya, dan Disposisi pada Sudin PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Barat.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **a) Manfaat Akademis**

Dengan mengetahui Implementasi Kebijakan Program *Jakpreneur* dalam memberdayakan Pelaku UKM di Sudin PPKUM, Kota Administrasi Jakarta Barat diharapkan dapat memperkaya/ menambah pengembangan ilmu pengetahuan tentang teori implementasi, teori kebijakan, kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam bidang ekonomi.

### **b) Manfaat Praktis**

Manfaat Praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah menghasilkan rekomendasi untuk Pemda DKI Jakarta, khususnya Kecamatan Kembangan di bagian Sudin PPKM Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Program *Jak-preneur*, sehingga kedepannya akan lebih baik.

POLITEKNIK  
STIA LAN  
JAKARTA  
JAKARTA